

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

Abdul Latif, 1959, Maftuh, 1970, Muhammad Dzul Ikram 1992, Penetapan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi, Edisi pertama, Cetakan ke-1, 2021, Jakarta, Kencana.

Adi Purna, Kewenangan Kejaksaan dalam menyidik perkara tindak pidana korupsi dari perspektif UU KPK, Cetakan 1, 2019, Palembang, UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya (Unsri Press).

Ahmad Hariri, Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume.2 No.1, 2014.

Amiroeddin Sjarif, 1927, Hukum Disiplin Militer Indonesia Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996.

Andi Hamzah, 1933, Hukum acara pidana Indonesia, 2001, Jakarta, Sinar Grafika,

Crouch, Harold, Militer dan politik di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Dini Dewi Heniati, Sistem peradilan militer di Indonesia: tinjauan teoritis, praktis, perbandingan hukum dan pembaruan Hukum Nasional, Bandung, Refika Aditama, 2017.

E.Y. KANTER, S.H dan S R. SIANTURI, SH. Hukum Pidana Militer di Indonesia Stora Grafika,

Gultom, Binsar M, Pandangan kritis seorang hakim : dalam penegakan hukum di Indonesia, Jakarta, 2012, Gramedia Pustaka Utama.

Ishaq H. 1963, Hukum Pidana, Rajawali Pers.

- Kiki Syahnakri, 1947. Teropong Prajurit TNI, Cetakan 1, Jakarta, 2015, Kompas Media Nusantara.
- Mardjono Reksodiputro., Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana., Cetakan III, Jakarta, 1999,
- Moch Faisal Salam, Hukum acara pidana militer di Indonesia, Bandung, 1996, Mandae Maju,
- Mokhammad Najih, Fifik Wiryani, Ratri Erdianti, Pengantar politik hukum pidana progresif dan strategi hukum pemberantasan korupsi, Edisi 1, 2019, Malang, Intelegencia Media, PT. Cita Intrans Selaras,
- Pangaribuan, Alboin, Kapita selekta tindak pidana korupsi (lex specialis derogat legi generau),
- Sagala, M. Justy Penus 1958. Perbuatan Dianggap Korupsi beserta penjelasannya, Cetakan Pertama, 2019,
- Siregar, Muhammad Yusuf, 1988. Delik aduan dalam teori & praktek pada sistem Peradilan Pidana : dilengkapi dengan putusan hakim dan undang-undang kekuasaan kehakiman, Cetakan Pertama, Medan, 2015, CV Mentari Persada,
- Subur Sukrisno, 1942, Korupsi dan Pencegahannya di Indonesia masa kini. Cetakan 1, Maret 2017, Bogor, IPB Press, 2017,
- Sugiri, 30 tahun perkembangan peradilan militer di Negara Indonesia, Cetakan 2, 1976, Jakarta, Indra Jaya,
- Sukiyat, Haji, Teori dan Praktik Pendidikan anti korupsi, Cetakan pertama, 2020, Surabaya, Jakad Publishing,
- Syahmin, Fidelia, Dedeng, Hukum Perjanjian Internasional, penghormatan, penundaan, pembatalan, dan pengakhiran perjanjian internasional, Cetakan pertama, 2019, Palembang, UPT, Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, (Unsri Press),

Stephen Boyle, 2003, *Organizational Identity Or Esprit De Corps? The Use Of Music In Military And Paramilitary Style Organisations*; Stream 21: Music at Work , University of South Australia

Tuti Budirahayu, Edy Herry Pryhantoro, Novri Susan, *Sosiologi Korupsi*, Edisi 2, Cetakan 1, Jakarta, 2009, Universitas Terbuka,

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Buku KUHP dan KUHP

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Tipikor Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Lembaran  
Negara Tahun 1965 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2781

## **C. Jurnal Hukum**

*Esprit De Corps And Desertion Intention In Indonesian Navy* - Department of Human Resource Management, Ph.D. ejournal, Candidate of Pascasarjana, State University of Jakarta

Kompol Mifta Hadi Safii, 2015, ejournal, *Membangun Esprit De Corps di Akademi Kepolisian*, program studi doctoral Ilmu Kepolisian di STIK-PTIK

*Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer* – ejournal - Kadek Wijana\*, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Shidarta & Petrus Lakonawa - *Lex Specialis Derogat Legi Generali : Makna dan Penggunaanya* – ejournal – Maret 2018, Binus University

Simanjuntak, Mangisi. (2016). Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik Dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September

Armunanto Hutahaean (2020). Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ejournal. Undip | Volume 49, No. 3, Juli

Permana Indra, Hulman Panjaitan, Armunanto Hutahaean. Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. Jurnal Cahaya Mandalika. Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI). Jakarta

#### **D. Artikel Hukum :**

[Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan Negara Rp 23,7 Triliun \(kompas.com\)](#)

[Kronologi OTT KPK yang Ungkap Dugaan Suap Kabasarnas \(kompas.com\)](#)

[Kronologi Polemik TNI-KPK terkait Kasus Dugaan Suap di Basarnas. Ternyata...](#)

[- Nasional Tempo.co](#)

[Nasib Kasus Kabasarnas Dikhawatirkan Sama dengan Korupsi Heli AW-101, TNI: Kami Terbuka \(kompas.com\)](#)

[Peradilan Tindak Pidana Korupsi - Beranda Hukum](#)